

DISKUSI MENGENAI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI NTT KHUSUSNYA DI WILAYAH PERBATASAN DENGAN NEGARA TIMOR LESTE

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹, Suzanna Josephine L.Tobing²,
Petrus Suwardi Mon³, Emma Tampubolon⁴

^{1,2,3,4} Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
^{1,2,3,4} Jl. Mayjen Sutoyo No.2, RT.5/RW.11, Cawang, Kramatjati, DKI Jakarta 13630

E-mail : posmahutasoit@gmail.com¹

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran terhadap berbagai variabel, seperti perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara/daerah adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas manusia. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan melakukan pendalaman masalah rendahnya IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan melakukan kegiatan diskusi bersama secara berkolaborasi dengan dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia dan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Matana. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan menjelang penelitian lapangan di perbatasan Provinsi NTT dengan negara Timor Leste. Diskusi dilanjutkan dengan melibatkan para mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah di NTT. Hasil kegiatan merangkum berbagai pendapat dari dosen-dosen dan mahasiswa kelahiran NTT yang mengalami langsung kesejahteraan daerahnya sehingga dapat memberi masukan mengenai permasalahan peningkatan IPM secara nyata. Nilai IPM NTT menempati urutan ketiga terendah secara nasional setelah Papua dan Papua Barat. Pertumbuhan IPM NTT juga hanya 0,73% lebih rendah dari yang nasional yaitu 0,91%. Rendahnya IPM terutama disebabkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang hanya 7,12 juta dan merupakan pengeluaran per kapita terendah di Indonesia. Peringkat pendidikan rata-rata di NTT adalah yang terendah keempat di Indonesia, dan usia harapan hidup juga yang terendah keenam dibandingkan provinsi lain.

Kata kunci : Indeks Pembangunan manusia (IPM), Nusa Tenggara Timur (NTT), Timor Leste, Wilayah Perbatasan.

ABSTRACT

The Human Development Index (HDI) is a measurement of various variables, such as comparison of life expectancy, literacy, education, and a decent standard of living. HDI is used to classify whether a country / region is a developed country, a developing country, or an underdeveloped country, and also to measure the effect of economic policy on human quality. The implementation of community service aims to deepen the problem of low HDI in East Nusa Tenggara (NTT) Province, by conducting joint discussion activities in collaboration with lecturers from the Faculty of Economics and Business, Indonesian Christian University and the Faculty of Economics, Business and Social Sciences, Matana University. The implementation of this activity is carried out ahead of field research on the border of NTT Province with the country of Timor Leste. The discussion continued with involving students from regions in NTT. The results of the activity summarize the opinions of lecturers and students born in NTT who have experienced directly the welfare of their regions so that they can provide input on the real HDI improvement problem. NTT HDI ranks third lowest nationally after Papua and West Papua. NTT HDI growth was also only 0.73% lower than the national level of 0.91%. The low HDI is mainly due to the per capita expenditure indicator which is only 7.12 million and is the lowest per capita expenditure in Indonesia. The average education rating in NTT is the fourth lowest in Indonesia, and life expectancy is also the sixth lowest compared to other provinces.

Keywords: Human Development Index (HDI), East Nusa Tenggara (NTT), Timor Leste, Border Region.

1. PENDAHULUAN

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16%, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2016 yang 5,17%, meskipun masih lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,07%. Pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, dan lembaga nirlaba, yang semuanya telah meningkat, serta pembentukan modal tetap/investasi tetap. Faktor-faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi termasuk impor bersih antar daerah dan impor yang tumbuh, mengakibatkan penurunan PDB Provinsi NTT. Impor bersih antar daerah dan impor masing-masing meningkat sebesar 4,39% dan 314,99% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar -0,28% dan 5,91%.

Berdasarkan sektor-sektor utama yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2017 mampu tumbuh secara progresif sebesar 4,88%, lebih baik dari tahun lalu 2,37% atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, bersamaan dengan pembukaan pertanian baru tanah dan meningkatkan jaringan irigasi berkelanjutan. Juga, sumber pertumbuhan ekonomi modern, yaitu sektor penyediaan akomodasi dan minum makanan (pariwisata) mampu memberikan pertumbuhan tinggi di atas 10% dalam dua tahun terakhir, yaitu 14,46% pada 2016 dan 13,59% pada 2017. Fokus dari pengembangan sektor ekonomi primer adalah pertanian, dan sumber-sumber pertumbuhan baru seperti pariwisata terus didorong untuk memajukan perekonomian Provinsi NTT lebih lanjut.

Persentase orang miskin di NTT pada bulan September 2017 mencapai 21,38 persen atau di atas tingkat nasional 10,12 persen. Persentase orang miskin di Provinsi NTT berada di peringkat ketiga tertinggi di Indonesia, di bawah Provinsi Papua (27,76 persen) dan Provinsi Papua Barat (23,12 persen). Dalam hal ketimpangan pengeluaran, rasio Gini di NTT pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,36 atau cenderung berada pada tingkat perbedaan rata-rata. Angka ini lebih baik dari nilai nasional 0,39. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran publik di NTT cenderung lebih merata dibandingkan dengan tingkat nasional.



Gambar 1. Peta Provinsi NTT yang Berbatasan dengan Timor Leste

Sumber: zonadamai.com/2013/03/27/

2. PERMASALAHAN

Secara nasional, garis kemiskinan Provinsi NTT berada di peringkat ke 28 setelah Provinsi NTB. Provinsi dengan garis kemiskinan (GK) tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 607.927. Sedangkan wilayah Sulawesi Selatan memiliki GK terendah Rp. 294.358 yang menunjukkan tingkat harga yang rendah di Provinsi. Kondisi kemiskinan di Provinsi NTT umumnya menunjukkan tren menurun. Namun, persentase utangnya masih di atas 20 persen, sehingga masalah kemiskinan masih perlu mendapat perhatian.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah melalui program sosial, seperti Desa Mandiri Anggur Merah, Program Keluarga Harapan, dan program lainnya. Namun, implementasi program ini masih tidak efektif karena lemahnya sinergi antar tingkat pemerintahan. Kehadiran investasi baru di NTT seperti pengembangan berbagai proyek strategis nasional, pertumbuhan industri gula di Sumba, pengembangan sektor ritel di kota Kupang dan pariwisata di Labuan Bajo diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pembukaan peluang kerja pariwisata yang ada. Selain itu, program Dana Desa yang telah dicairkan mulai tahun 2015 juga diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat di daerah pedesaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah hal penting untuk mendukung hal ini melalui pendidikan formal dan pelatihan keterampilan.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan melakukan pendalaman masalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTT, dengan melakukan kegiatan diskusi bersama secara berkolaborasi

dengan dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia dan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Matana. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan menjelang penelitian lapangan di perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan negara Timor Leste. Diskusi dilanjutkan dengan melibatkan para mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah di NTT.

3. METODOLOGI

Metode penulisan laporan ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu dengan melakukan beberapa tinjauan dari berbagai literatur dan deskripsi kuantitatif dari berbagai sumber data sebagai data sekunder. Data yang

diperoleh sebagai sumber terutama adalah Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Pembangunan Daerah.

Metode pelaksanaan diawali dengan rapat perencanaan, persiapan bahan, pelaksanaan dan evaluasi. Lalu kegiatan dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap 1. Diskusi yang dilakukan secara kolaborasi antara dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia, Jakarta dan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Matana, Tangerang.
2. Tahap 2. Diskusi dengan para mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah di NTT.



Gambar 2. Diskusi Tahap 1, kolaborasi antar dosen



Gambar 3. Diskusi Tahap 2 dengan para mahasiswa

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran terhadap berbagai variabel, seperti perbandingan harapan hidup (dimensi kesehatan), melek huruf, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara/daerah adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas manusia. Dimensi IPM memiliki pemahaman yang komprehensif karena terkait dengan banyak faktor. Mengukur aspek kesehatan dengan

menggunakan indikator harapan hidup. Untuk mengukur dimensi pendidikan, menggunakan indikator untuk harapan usia sekolah dan usia rata-rata sekolah. Untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak, daya beli masyarakat digunakan untuk beberapa kebutuhan dasar, terlihat dari jumlah rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk kehidupan layak.

Wilayah Perbatasan Provinsi NTT dan Negara Timor Leste

Wilayah Perbatasan Negara adalah wilayah negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, di darat, di lautan, atau di udara, yang batas-batasnya ditentukan sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan manajemen perbatasan, Indonesia telah memiliki lembaganya tersendiri, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (BNPP, 2015)

Kurangnya pengembangan optimal dan pemanfaatan fasilitas dasar atau infrastruktur di wilayah perbatasan adalah masalah umum yang terjadi di hampir semua wilayah perbatasan Indonesia. Jika daerah perbatasan dibelakang dan terisolasi, aksesibilitas yang kurang, terutama akses ke layanan publik, pemerintah pusat, atau daerah maju lainnya menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk tidak merata karena karakteristik geografis daerah tersebut juga memberikan kontribusi besar. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali di luar daya dukungnya, menambah kompleksitas masalah yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia. (Kennedy, 2018)

Kondisi wilayah perbatasan saat ini, secara umum, belum mendapat perhatian yang sama. Ini bisa dilihat dari minimnya infrastruktur yang tersedia di wilayah perbatasan. Ini telah menyebabkan banyak masalah seperti perubahan batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa, serta kejahatan lintas negara. Kondisi umum ekonomi di wilayah perbatasan meliputi hal-hal seperti berikut, yaitu lokasinya relatif terisolasi atau jauh dengan tingkat aksesibilitas yang rendah; tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya yang rendah; tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan yang rendah; serta kelangkaan informasi tentang pengembangan pemerintah dan masyarakat di daerah perbatasan (titik kosong). (Maulana, 2010)

Provinsi NTT adalah wilayah kecamatan dan kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan dengan Timor Leste. Wilayah perbatasan Provinsi NTT adalah perbatasan darat yang secara administratif meliputi 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka. Sedangkan Kabupaten Alor berbatasan laut dengan Timor Leste.

IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bappenas, 2017)

Nilai IPM NTT menempati urutan ketiga terendah secara nasional setelah Papua dan Papua Barat. Pertumbuhan IPM NTT juga hanya 0,73% lebih rendah dari yang nasional yaitu 0,91%. Rendahnya IPM terutama disebabkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang hanya 7,12 juta dan merupakan pengeluaran per kapita terendah di Indonesia. Peringkat pendidikan rata-rata di NTT adalah yang terendah keempat di Indonesia, dan usia harapan hidup juga yang terendah keenam dibandingkan provinsi lain. Tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa sebagai provinsi ketiga yang paling miskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,01% dari penduduknya, itu jauh lebih tinggi daripada negara yang 10,7%.



Gambar 3. Sepuluh Provinsi Termiskin dan Terkaya

IPM Provinsi NTT untuk periode 2013-2017 mengalami peningkatan rata-rata 1,86%. IPM NTT terus meningkat, yaitu dari 2016 sebesar 67,75 menjadi 68,28 pada 2017 atau meningkat sebesar 0,36 dalam tiga tahun. Berdasarkan rata-rata nasional dari 2005 hingga 2012, NTT berada di posisi ke-31 dari 34 Provinsi. Meskipun IPM NTT terus meningkat, secara nasional, masih jauh di belakang. Pada 2012, IPM Provinsi NTT adalah 60,81 tertinggal jauh dari rata-rata IPM nasional (Indonesia), yang mencapai 67,70. Kemudian terus tertinggal hingga 2017 IPM NTT 63,73, rata-rata IPM nasional telah mencapai 70,81. (RPJMN NTT, 2018)

Rendahnya IPM terutama disebabkan oleh indikator pengeluaran per kapita, yang hanya 7,12 juta dan merupakan pengeluaran per kapita terendah di Indonesia. Peringkat rata-rata pendidikan di NTT adalah yang terendah keempat di Indonesia, dan usia harapan hidup juga terendah keenam dibandingkan dengan provinsi lain. Tingkat kemiskinan menunjukkan sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia dengan

populasi yang jarang, mencapai 22,01% penduduk, jauh lebih tinggi dari nasional 10,7% (Bappenas, 2017).



Gambar 4. Sepuluh IPM Provinsi NTT
Garis Merah: IPM Nasional; Garis Biru: IPM NTT

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Usia Harapan Hidup (thn)	65,81	65,91	65,96	66,04	66,07
Harapan Lama Sekolah (thn)	12,27	12,65	12,84	12,97	13,07
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	6,76	6,85	6,93	7,02	7,15
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	6.899	6.934	7.003	7.122	7.350
IPM NTT	61,68	62,26	62,67	63,13	63,73
IPM Rata-rata Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber: BPS NTT, 2018

Dimensi Pendidikan (RPJMN NTT, 2018)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di NTT terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah di NTT mencapai 6,93 tahun, meningkat pada tahun 2016 menjadi 7,02 tahun dan pada tahun 2017 menjadi 7,15 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di NTT hanya mencapai kelas-7.

Tabel 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kupang	6,71	6,84	6,88	6,93	7,1
Timor Tengah Utara	6,22	6,69	6,87	7,13	7,14
Belu	6,95	7,03	7,05	7,06	7,07
Alor	7,68	7,74	7,75	7,76	7,77

Malaka	5,64	6,07	6,08	6,31	6,32
Nusa Tenggara Timur	6,76	6,85	6,93	7,02	7,15

Sumber : BPS NTT, 2018

Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah di NTT menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2016 harapan lama sekolah di NTT mencapai 12,97 tahun, meningkat pada tahun 2017 menjadi 13,07 tahun.

Tabel 3. Harapan Lama Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kupang	13,13	13,45	13,47	13,48	13,49
Timor Tengah Utara	13,03	13,24	13,26	13,27	13,28
Belu	11,02	11,41	11,80	12,02	12,24
Alor	10,94	11,25	11,41	11,64	12,08
Malaka	11,34	11,56	12,01	12,28	12,75
Nusa Tenggara Timur	12,27	12,65	12,84	12,97	13,07

Sumber : BPS NTT, 2018

Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf (ABH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. ABH NTT pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Pada tahun 2017 ABH NTT sebesar 7,25%, turun sebesar 0,15% dibanding tahun 2016 sebesar 7,40%.

Tabel 4. Angka Buta Huruf di Provinsi NTT

Wilayah	Persentase Buta Huruf (Persen)					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Kupang	7,20	5,67	9,11	8,39	8,13	6,99
Timor Tengah Utara	7,23	5,79	8,38	9,71	7,81	7,78
Belu	9,43	7,91	12,01	12,15	10,73	10,04
Alor	1,92	2,25	5,78	5,38	3,93	3,89
Malaka	11,87	12,06	13,38	13,26	12,66	12,70
Nusa Tenggara Timur	6,07	5,87	8,69	8,58	7,40	7,25

Sumber : BPS NTT, 2018

Dimensi Hidup Layak (RPJMN NTT, 2018)

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menunjukkan tingkat konsumsi rumah tangga.

Semakin besar konsumsi, semakin atraktif bagi peningkatan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi dihitung berdasarkan pengeluaran untuk bahan makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Pola pengeluaran konsumsi ini juga menjadi salah satu alat menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran berarti semakin buruk kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena, makanan adalah prioritas pengeluaran rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah, sehingga tidak banyak pendapatan yang tersisa untuk kebutuhan non makanan. Perkembangan pengeluaran per kapita menurut kelompok makanan penduduk NTT bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan Penduduk NTT menurut Kelompok Pengeluaran

Wilayah	Tahun	2015	2016	2017
NTT	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	298.180	312.312	399.251
	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok NonMakanan	235.710	264.315	282.232
	Persentase makanan terhadap total pengeluaran	56%	54%	59%
NASIONAL	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	412.462	460.639	527.956
	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Non-Makanan	456.361	485.619	508.541
	Persentase makanan terhadap total pengeluaran	47%	49%	51%

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Secara merata, pengeluaran per kapita untuk makanan per bulan di NTT tidak banyak berubah sejak tahun 2013 sampai 2017, dan hanya terjadi sedikit peningkatan. Ada penurunan pada tahun 2014, tetapi kembali meningkat tahun 2015 dan 2017 sehingga, pada tahun 2017, persentase pengeluaran untuk kelompok makanan mendominasi pengeluaran keluarga dengan angka 59%. Dibandingkan konsumsi berdasarkan kelompok pengeluaran secara nasional, persentase NTT tetap lebih tinggi, walaupun persentase nasional juga tidak banyak berubah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, persentase pengeluaran kelompok makanan penduduk NTT sebesar 59%, sedangkan secara nasional sebesar

51%. Ini berarti, NTT masih butuh peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk agar persentase pengeluaran untuk makanan bisa menurun dan konsumsi keluarga bisa lebih atraktif. Ini bukan saja meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi positif untuk ekonomi daerah.

Jumlah Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 pengeluaran per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 6,615 juta meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp 7,35 juta. Walau terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat NTT, namun jumlah tersebut masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai Rp12,44 juta.

Tabel 6. Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kupang	6.875	6.945	7.085	7.217	7.301
Timor Tengah Utara	5.626	5.679	5.799	5.930	6.164
Belu	6.967	7.025	7.083	7.199	7.251
Alor	6.223	6.284	6.346	6.468	6.553
Malaka	5.495	5.512	5.563	5.658	5.726
Nusa Tenggara Timur	6.899	6.934	7.003	7.122	7.350

Sumber : BPS NTT, 2018

Dimensi Kesehatan (RPJMN NTT, 2018)

Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup digunakan untuk menilai status kesehatan. Selain itu, ini adalah salah satu indikator yang dipertimbangkan dalam mengevaluasi IPM. Gambaran penduduk NTT pada 2015 memiliki harapan hidup 65,96, yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada 2015 diharapkan hidup rata-rata hingga usia 66 tahun. Pada tahun 2016 angka harapan hidup adalah 66,04, yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup rata-rata hingga usia 67 tahun, dan pada tahun 2017 angka harapan hidup adalah 66,07. Harapan hidup populasi setiap tahun meningkat tetapi tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 1-5 bulan. Dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7. Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kupang	62,87	62,97	63,17	63,33	63,49
Timor Tengah Utara	65,89	65,89	66,09	66,14	66,19
Belu	62,26	62,31	63,01	63,21	63,42
Alor	59,71	59,73	60,23	60,35	60,47
Malaka	64,11	64,15	64,15	64,27	64,29
Nusa Tenggara Timur	65,82	65,91	65,96	66,04	66,07

Sumber : BPS NTT, 2018

Untuk kasus kematian bayi, anak balita dan balita di NTT menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi tahun 2016 sebanyak 1.689 jiwa, jumlah kematian anak balita tertinggi sejumlah 449 jiwa terjadi tahun 2016 dan jumlah kematian balita tertinggi sejumlah 1.174 pada tahun 2017. Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi di Kabupaten Kupang tahun 2015 sebanyak 198 jiwa, jumlah kematian anak balita tertinggi terjadi tahun 2015 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan jumlah kematian balita tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017 sejumlah 170 jiwa.

Tabel 8. Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Kasus Kematian				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus kematian bayi	1.286	1.280	1.300	1.088	1.044
Jumlah kasus kematian balita	1.478	1.437	1.480	1.268	1.174

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Untuk kasus kematian ibu di NTT mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah kematian ibu 176 kasus, menurun tahun 2014 sejumlah 158 kasus, untuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing menjadi 182 kasus menurun menjadi 163 kasus.

Tabel 9. Kasus Kematian Ibu di NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Kasus Kematian Ibu				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus kematian ibu	176	158	176	182	163

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dilihat dari dimensi kesehatan lainnya, gizi buruk merupakan suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein)

adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita.

Tabel 10. Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase gizi buruk	1,10	1,00	0,96	0,87	0,87
Persentase gizi kurang	6,90	7,15	4,16	2,50	2,84

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Persentase balita dan baduta stunting di Provinsi NTT menurun dari tahun 2015 ke tahun 2017, namun masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kenaikan justru terjadi pada persentase balita dan baduta wasting dan underweight.

Tabel 11. Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2015-2017

Kelompok Umur	Indikator	NTT Tahun		Indonesia
		2016	2017	2017
Baduta	Stunting	32,1	29,8	20,1
	Wasting	17,5	17,9	12,8
Balita	Under weight	23,0	22,8	14,8
	Stunting	38,7	40,3	29,6
	Wasting	17,4	15,8	9,5
	Underweight	28,2	28,3	17,8

Sumber : RPJMN NTT, 2018

Masalah Kesehatan dan Pendidikan di Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Masalah Kesehatan

Kementerian Kesehatan perlu memberikan perhatian khusus pada daerah perbatasan, dengan memperhatikan kondisi daerah, distribusi target layanan serta jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan. Jika dilihat dari faktor penentu permintaan yaitu dari faktor pengguna, kendala yang ada adalah jarak tempat tinggal pengguna dari tempat layanan, sulitnya akses ke lokasi perawatan kesehatan, kurangnya dana untuk biaya transportasi dan kurangnya dana untuk biaya pengobatan karena situasi ekonomi masyarakat. Perhatian khusus diperlukan dari Kementerian Kesehatan, bersama dengan pemerintah daerah, untuk mengatasi masalah ini. Program layanan kesehatan yang harus ditingkatkan, setidaknya adalah: Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia di sektor kesehatan; Pengadaan, peningkatan, dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur Asisten Puskesmas dan jaringan mereka; Meningkatkan pembangunan infrastruktur kesehatan dan

pendukungnya; Sosialisasi dan peningkatan layanan asuransi kesehatan dari pemerintah; Meningkatkan sumber daya manusia di sektor kesehatan dengan menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas jurusan kesehatan di institusi/akademi di daerah; dan Mitigasi bencana.

Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya di wilayah perbatasan dan pola pelayanan prima. Pemberian insentif melalui kegiatan yang termasuk dalam tugas-tugas bantuan khusus tanpa memandang status dan asal pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Khusus untuk pekerja perbatasan, pelatihan dapat dilakukan untuk kualitas lebih baik. Dan juga perlu memenuhi ketersediaan transportasi untuk rujukan sesuai dengan topografi, seperti sepeda motor, kendaraan roda empat atau mobil, jenis kapal tertentu, dan hemat bahan bakar (Suharmiati, 2013).

Dalam menerapkan kebijakan kesehatan, perlu ada konteks konten dan kebijakan. Konten kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku masyarakat. Posisi pengambil keputusan yang tersebar secara geografis membuat implementasi kebijakan tidak optimal. Adapun konteks kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, adalah pengaruh kekuatan dan kepentingan aktor politik. Koordinasi yang lemah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dipengaruhi oleh kepentingan politik membuat proses penerapan kebijakan kesehatan tidak optimal. Serta program-program oleh gubernur dalam menerapkan strategi, untuk mempertahankan kewenangannya menerapkan kebijakan kesehatan dalam menangani gizi buruk di Provinsi NTT (Ramadhini, 2015).

Masalah Pendidikan

Dalam pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan NTT, perlu memperhatikan beberapa faktor yang menjadi prioritas utama. Faktor internal yang terkait dengan efektivitas proses belajar mengajar yang notabene sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas pembelajaran, kualitas dan kuantitas, metode pengajaran dan manajemen pendidikan; dan faktor eksternal yang melibatkan peran orang tua, masyarakat dan pemerintah yang mendukung pengembangan pendidikan berkualitas.

Masalah yang dihadapi di sektor pendidikan yang perlu ditangani dengan benar

adalah (Bappenas, 2017):

- Fasilitas dan infrastruktur: Kurangnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan, ruang serba guna, laboratorium, dan ruang olahraga; Bangunan sekolah perlu segera diperbaiki karena sebagian besar kondisinya tidak cocok untuk digunakan dalam proses belajar mengajar; Kurangnya buku untuk mendukung kelancaran proses belajar sehingga siswa mendapat lebih sedikit buku sebagai bahan referensi
- Pendidik: Kurangnya guru yang berkualitas untuk setiap mata pelajaran; Kualitas guru tidak memadai
- Peserta didik: Kemampuan terbatas masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat perbatasan di pedalaman dan pulau-pulau kecil terluar dalam pendanaan pendidikan anak-anak mereka dangkal karena pendapatan yang diperoleh juga rendah. Sedangkan di sisi lain, mengajar membutuhkan biaya yang signifikan dan berkelanjutan setiap saat. Akibatnya, anak-anak usia sekolah sering lebih diberdayakan oleh orang tua mereka untuk membantu pekerjaan mereka menghasilkan uang sehingga ekonomi keluarga membaik; dan kemampuan dan keterampilan siswa jauh dari yang diharapkan. Karena keterbatasan fasilitas dan pendidik yang kurang memiliki talenta dan keterampilan
- Manajemen sekolah: Manajemen sekolah masih belum optimal, dan kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sekolah
- Partisipasi masyarakat: Kurangnya keterlibatan optimal masyarakat dalam mengembangkan kemitraan untuk meningkatkan kinerja sekolah

5. KESIMPULAN

Nilai IPM NTT menempati urutan ketiga terendah secara nasional setelah Papua dan Papua Barat. Pertumbuhan IPM NTT juga hanya 0,73% lebih rendah dari yang nasional yaitu 0,91%. Rendahnya IPM terutama disebabkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang hanya 7,12 juta dan merupakan pengeluaran per kapita terendah di Indonesia. Peringkat pendidikan rata-rata di NTT adalah yang terendah keempat di Indonesia, dan usia harapan hidup juga yang terendah keenam dibandingkan provinsi lain. Pemerintah harus memperhatikan dua masalah

mendasar di wilayah perbatasan NTT, yaitu masalah kesehatan dan pendidikan.

Program layanan kesehatan yang harus ditingkatkan, setidaknya adalah: Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia di sektor kesehatan; Pengadaan, peningkatan, dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur Asisten Puskesmas dan jaringan mereka; Meningkatkan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendukungnya; Sosialisasi dan peningkatan layanan asuransi kesehatan dari pemerintah; Meningkatkan sumber daya manusia di sektor kesehatan dengan menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas jurusan kesehatan di institusi/akademi di daerah; dan Mitigasi bencana.

Untuk pengembangan pendidikan perlu diperhatikan factor internal dan eksternal untuk dijadikan prioritas utama. Faktor internal yang terkait dengan efektivitas proses belajar mengajar yang notabene sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas pembelajaran, kualitas dan kuantitas, metode pengajaran dan manajemen pendidikan; dan faktor eksternal yang melibatkan peran orang tua, masyarakat dan pemerintah yang mendukung pengembangan pendidikan berkualitas.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilanjutkan dengan penelitian lapangan langsung di wilayah perbatasan Provinsi NTT dengan Negara Timor Leste.



Gambar 4. Berfoto Bersama Para Mahasiswa setelah Berdiskusi

DAFTAR HADIR FORM GROUP DISKUSI (FGD)			
NO	NAMA	INSTRUMEN	TTD
1	Dr. Prisma Sengulua Nihon (Ketua)	Konsep Presentasi (KPP)	[Signature]
2	Harisda Illimurus	WNI	[Signature]
3	Erena Timpaketai	WNI	[Signature]
4	Pi. Yungilia Pabuyi	WNI	[Signature]
5	Dr. Alisa Nala	WNI	[Signature]
6	Nida Pa. Wotoni	WNI	[Signature]
7	Putriana Lumbanraha	WNI	[Signature]

DAFTAR HADIR FORM GROUP DISKUSI (FGD)			
NO	NAMA	INSTRUMEN	TTD
1	Dr. Prisma Sengulua Nihon (Ketua)	Konsep Presentasi (KPP)	[Signature]
2	Harisda Illimurus	WNI	[Signature]
3	Erena Timpaketai	WNI	[Signature]
4	Pi. Yungilia Pabuyi	WNI	[Signature]
5	Dr. Alisa Nala	WNI	[Signature]
6	Nida Pa. Wotoni	WNI	[Signature]
7	Putriana Lumbanraha	WNI	[Signature]

DAFTAR HADIR FORM GROUP DISKUSI (FGD)			
NO	NAMA	INSTRUMEN	TTD
1	Dr. Prisma Sengulua Nihon (Ketua)	Konsep Presentasi (KPP)	[Signature]
2	Harisda Illimurus	WNI	[Signature]
3	Erena Timpaketai	WNI	[Signature]
4	Pi. Yungilia Pabuyi	WNI	[Signature]
5	Dr. Alisa Nala	WNI	[Signature]
6	Nida Pa. Wotoni	WNI	[Signature]
7	Putriana Lumbanraha	WNI	[Signature]

Gambar 5. Daftar Hadir Peserta Diskusi

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilakukan, berkat pendanaan penelitian Simlibtamas yang disediakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Koordinasi Pendidikan Tinggi Wilayah III Pendidikan Tinggi Swasta. Peneliti juga mengucapkan terima kasih

kepada LPPM-UKI dan semua yang telah membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2017. PrADa Profil dan Analisis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017, Jakarta: Kedepatian Bidang Pengembangan Regional.
- BNPP, 2015. Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, Jakarta, 2015.
- BPS NTT, 2018, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, <https://ntt.bps.go.id/https://zonadamai.com/2013/03/27/ternak-lepas-picu-konflik-di-perbatasan-ntt-timor-leste/>
- Kennedy P.S.J., Tobing S.J.L., Heatubun A.B., Toruan R.L., "Strategic Issues of Indonesian Border Area Development based on The Master Plan 2015-2019", Proceeding International Seminar on Accounting for Society, Faculty of Economy Universitas Pamulang, pp.190-198, 2018.
- Maulana, Firkan, 2010. Input Paper RPJMN II 2010-2014 Pengembangan Kawasan Perbatasan, Jakarta: Decentralization Support Facility.
- Presiden Republik Indonesia, 2015. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Republik Indonesia, Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Jakarta, 2015.
- RPJMD, NTT, 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023, Kupang.
- SIPD Provinsi NTT, 2018.